

Polisi Belum Jadwal Periksa Roy Suryo soal Meme Patung di Candi Borobudur Mirip Jokowi

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo terkait meme patung di Candi Borobudur yang diedit menjadi mirip wajah Presiden RI Joko Widodo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, pihaknya sudah menerima dua laporan terkait unggahan gambar yang dianggap melecehkan simbol agama Buddha itu.

Laporan pertama dilayangkan oleh Roy Suryo terhadap pemilik akun media sosial yang pertama kali mengunggah gambar tersebut. Sementara itu, laporan kedua dilayangkan oleh seorang umat Buddha bernama Kurniawan Santoso terhadap Roy Suryo yang ikut mengunggah ulang meme Patung Sang Buddha itu.

"Jadi kan ada dua laporan itu, (Roy Suryo) sebagai pelapor dan terlapor ya. Jadi penyidik akan menangani laporan itu secara profesional," ujar Zulpan saat dikonfirmasi, Rabu (22/6).

Saat ini, kata Zulpan, penyidik masih mempelajari laporan tersebut dan belum menjadwalkan pemanggilan terhadap Roy Suryo, baik sebagai pelapor maupun terlapor.

"Saya sudah telepon penyidik agenda tanggal pemanggilannya itu belum ada, tapi LP itu sudah masuk, jadi dipelajari dulu," kata Zulpan.

Diberitakan sebelumnya, seorang umat Buddha bernama Kurniawan Santoso melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, Senin (20/6). Sambal didampingi kuasa hukumnya, Herna Sutana, Kurniawan melaporkan Roy Suryo terkait unggahan gambar meme patung di Candi Borobudur yang disunting menjadi mirip wajah Presiden RI Joko Widodo di media sosial.

"Kami juga umat Buddha, mendampingi terl-

apor terkait dugaan tindak pidana UU ITE dan juga terkait masalah simbol agama," ujar Herna kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/6).

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/3042/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 20 Juni 2022. Dalam laporannya, Roy Suryo dipersangkakan dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Kemudian Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Herna.

Roy Suryo dilaporkan karena turut serta menyebarkan gambar yang diduga mengandung ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Menurut Herna, meme yang diunggah ulang oleh Roy Suryo adalah editan gambar Patung Siddhartha Gautama atau dikenal sebagai Sang Buddha.

Dalam unggahannya, Roy Suryo dianggap melecehkan dan mengolok-olok Patung Sang Buddha karena mengunggah ulang gambar tersebut disertai kata "lucu" dan "ambyar".

"Kalimat yang dia tambahkan adalah 'lucu hehehe ambyar'. Itu bahasa yang sangat melecehkan," ucap Herna.

"Dia tahu bahwa itu diedit, dia tahu bahwa itu simbol agama yang sangat sakral buat kami, dia tahu diubah, tapi ditertawakan," ujarnya.

Herna pun berharap penyelidikan laporan tersebut berjalan beriringan dengan laporan yang dilayangkan oleh Roy Suryo pada Rabu (16/6). "Ini harus berjalan beriringan, karena apa yang kami laporkan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi ini kepentingan umat," kata Herna. ● lus

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



Seluruh Kegiatan Ormas Khilafatul Muslimin Dilarang di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Khilafatul Muslimin dilarang melakukan kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya karena mereka berupaya mengganti Ideologi Indonesia, Pancasila.

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya melarang semua kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin di wilayah hukumnya, termasuk aktivitas belajar mengajar di lembaga pendidikan Ukhuwah Islamiyah yang dinaungi ormas tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, langkah terse-

but diambil seiring dengan ditemukannya dugaan pelanggaran dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Khilafatul Muslimin.

Polisi menyebutkan, Khilafatul Muslimin menyebarkan ajaran khilafah dalam setiap kegiatannya dan berupaya mengganti Ideologi Indonesia, Pancasila.

"Kami sudah memerintah-

kan jajaran untuk tidak ada lagi kegiatan-kegiatan Khilafatul Muslimin di wilayah Polda Metro Jaya," ujar Zulpan saat dihubungi, wartawan pada Rabu (22/6).

Adapun wilayah hukum Polda Metro Jaya meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Zulpan menyatakan bahwa langkah yang diambil kepolisian sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Agama (Kemendagri).

Selain itu, lanjut Zulpan, larangan ini juga turut disuarakan oleh ormas Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Dalam pertemuan bersama dengan Kemendikbud Ristek dan Kemendagri, PWNU dan Muhammadiyah dijelaskan bahwa sekolah-sekolah itu tidak terdaftar," kata Zulpan.

Sementara langkah sejumlah anggota ormas Khilafatul Muslimin di Bekasi yang membacakan sumpah setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disambut baik Polda Metro Jaya.

Zulpan mengatakan, kesadaran para anggota Khilafatul Muslimin untuk kembali kepada ideologi Pancasila dan setia kepada NKRI dinilai sebagai langkah baik.

"Kaitannya dengan itu kami menyambut baik hal itu, kalau sudah ada kesadaran dari diri semua orang yang selama ini mendapatkan pemahaman yang keliru," ujar Zulpan.

"Tentu kita menyambut baik deklarasi itu. Mereka kembali kepada falsafah bangsa sesungguhnya, ideologi bangsa sesungguhnya, nation ideology yaitu Pancasila. Itu tentu yang kami harapkan," kata Zulpan lebih lanjut.

Meski begitu, Zulpan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ormas Khilafatul Muslimin yang kini ditangani Polda Metro Jaya tetap berjalan. Penyidik pun saat ini masih melakukan pengembangan dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru dari hasil pe-

nyidikan kepolisian.

"Kemudian terkait dengan Khilafatul Muslimin ini, apa yang sedang ditangani PMJ itu tentu tetap dilakukan. Penyidikan berlanjut kaitan dengan pelanggaran Ormas ini," kata Zulpan.

Saat ini penyidik masih terus menyelidiki Khilafatul Muslimin. Sejumlah petinggi kelompok penyebar ideologi khilafah ini pun telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Setidaknya sudah enam orang petinggi Khilafatul Muslimin ditangkap dan sudah berstatus tersangka.

Salah satu di antaranya adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap pada Selasa (7/6) di Bandar Lampung.

Penangkapan bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video itu tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa warna hijau.

Beberapa di antaranya tampak mengibarkan bendera dan membawa poster bertuliskan "Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyyah". Zulpan sebelumnya menuturkan, keempat orang itu ditangkap dari berbagai lokasi di Indonesia pada Sabtu (11/6). ● lus



Polisi Ungkap Kecurangan Takaran BBM di SPBU Serang

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga (kiri) didampingi Dir Reskrimus Kombes Pol Dedi Supriadi (kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti saat ekspos pengungkapan kecurangan takaran BBM di SPBU, di Serang, Rabu (22/6). Jajaran Polda Banten berhasil mengungkap kecurangan takaran BBM di SPBU 34-42117 Gorda Serang yang difungsikan dengan remot dari jarak jauh sejak tahun 2016 serta menangkap manajer dan pemilik SPBU berinisial BF dan FT dengan nilai kerugian pelanggan ditaksir mencapai Rp7,2 miliar.

Bentrok Rombongan Pengantar Jenazah dengan Warga, 4 Orang Ditangkap Polisi

MAKASSAR (IM) - Aparat Polsek Biringkanaya dan Polrestabes Makassar menangkap empat orang diduga terlibat bentrokan antara rombongan pengantar jenazah dengan warga, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu.

"Kita sudah amankan empat orang," ujar Kapolsek Biringkanaya, Kompol Andi Alimuddin, Rabu (22/6).

Sementara itu, kondisi keenam korban yang dirawat di rumah sakit kini mulai membaik. Andi mengimbau kepada masyarakat yang melakukan pengantaran jenazah agar tidak meresahkan.

"Kepada pihak yang mengantar juga supaya menghubungi kita, supaya bisa dilakukan pengawalan," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa video amatir yang beredar luas di sosial media. Saat rombongan pengantar jenazah dari arah Kota Makassar menuju perbatasan Kabupaten Maros. Mereka terlibat

bentrokan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tampak video amatir, sejumlah rombongan pengantar jenazah berkendaraan motor yang ada di depan ambulans putar arah setelah terlibat bentrok. Sementara itu, salah satu orang yang diduga ikut dalam rombongan pengantar jenazah ini terlihat membentangkan busur panah ke arah warga yang datang dari samping mobil ambulans.

Sementara itu, dari atas mobil ambulans terdapat salah seorang penumpang merekam video menggunakan kamera telepon seluler. Mobil ambulans pun berusaha menerobos bentrokan ke arah warga, namun ambulans malah jadi sasaran aksi amuk warga.

Sang sopir ambulans pun terus melajukan mobil yang dikemudikannya untuk menghindari amuk warga yang lebih parah. ● lus

LOWONGAN

ANDA YANG KAMI CARI

Account Executive / Marketing

- Pria / Wanita
- Pendidikan min SMA / D3 (Berijazah)
- Berpenampilan menarik
- Kreatif, inovatif & Integritas
- Berjiwa Marketing & berperilaku baik
- Bisa bekerja di bawah tekanan dan mampu bekerja dalam team
- Berpengalaman di bidangnya
- Ramah, Mandiri dan memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan

Segera kirimkan CV Lengkap ke:
guojiribao.iklan@gmail.com

Ivan Gunawan Kembali Diperiksa di Bareskrim Terkait Kasus DNA Pro

JAKARTA (IM) - Artis Ivan Gunawan kembali mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memberi keterangan tambahan terkait kasus penipuan via aplikasi robot trading DNA Pro Akademi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri menjelaskan bahwa pemeriksaan tambahan itu dilakukan dalam rangka melakukan pemenuhan kelengkapan berkas.

"Iya pemenuhan P19 jaks," kata Whisnu saat dikonfirmasi, Rabu (22/6).

Adapun berkas perkara terhadap 4 tersangka kasus DNA Pro sudah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri ke pihak Kejaksaan Agung pada bulan Mei lalu. Namun, berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi (P19).

Secara terpisah, kuasa hukum Ivan, Sandy Arifin, menjelaskan bahwa kedatangan kliennya ke Bareskrim berkaitan dengan kasus DNA Pro. Kliennya diberikan sejumlah pertanyaan tambahan. Namun, ia tidak merincikan pertanyaan yang dimaksud.

Ivan Gunawan sebenarnya sudah diperiksa terkait DNA Pro pada Kamis (14/4) lalu. Saat diperiksa pertama kali, Ivan mengaku ia hanya brand ambassador dari DNA Pro. Usai pemeriksaan di Bareskrim Polri, Ivan Gunawan langsung mengembalikan uang

yang diterimanya sebesar Rp 921,7 juta yang telah dipotong pajak.

Sejumlah artis sempat menerima aliran dana dari platform aplikasi tersebut. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada sejumlah artis yang diperiksa, antara lain Ivan Gunawan, Sri Rossa Roslana Handayani alias Rossa, DJ Puteri Una Astarti Thamrin atau DJ Una, Lesti Kejora, hingga Rizky Billar.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita uang sejumlah artis yang diterimanya dari pihak DNA Pro Akademi. Tetapi, ada juga artis yang uangnya tidak disita setelah menjalani pemeriksaan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, penyidik memiliki pertimbangan untuk menyita uang terkait kasus DNA Pro Akademi.

"Karena lihat mens reanya, lihat niat jahatnya, apakah profesional atau tidak, kalau dia ada kontraknya sesuai dengan kegiatan yang tidak kena (sita)," kata Whisnu saat dihubungi, Selasa (26/4).

Hal ini menyebabkan ada sederet artis yang mengembalikan uang agar disita. Sementara, sisanya tidak. Dari jumlah artis yang diperiksa, Ivan Gunawan, Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan artis yang uangnya disita. ● lus